



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 02 Juni 2020

Halaman: 3

Bantu Orang Tua Yang Kesulitan Ekonomi

ANGGOTA Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Ali Fahmi menyebut sektor pendidikan terdampak pandemi Covid-19. Menurutnya, siswa belajar di rumah termasuk masyarakat kesulitan membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sekolah anaknya lantaran kesulitan ekonomi.

"Dalam rapat Komisi D dengan Dinas Pendidikan terkait peralihan pos APBD di masa tanggap darurat, bansos untuk keringanan tunggakan SPP yang semula Rp 700 juta sudah kami naikan

menjadi Rp2 miliar. Pos anggaran ini kami naikan mengingat semakin banyaknya orang tua siswa yang membutuhkan keringanan biaya SPP," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (1/6).

Dia menyebut, bansos keringanan tunggakan SPP untuk siswa beralamat Kota Yogyakarta ditunjukkan dengan Kartu Menuju Sehat (KMS) maupun siswa non KMS, sekolah di dalam Kota maupun luar Kota Yogyakarta, serta sekolah negeri maupun swasta. Ke-

cuali tunggakan SPP SMA/SMK negeri tidak dibiayai Pemkot karena sudah diampu Pemerintah Provinsi.

Siswa yang dapat mengakses, ujarnya, yang naik kelas 5 dan lulus kelas 6 SD/ sederajat, naik kelas 8 dan lulus kelas 9 SMP/ sederajat, naik kelas 11 dan lulus kelas 12 SMA/SMK/ sederajat. Di samping itu siswa lulus SD, SMP, SMA/SMK atau sederajat yang lulus tahun 2010 sampai dengan 2019 juga dapat mengajukan keringanan. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005